

## BAB V

### SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini merupakan kesimpulan dari penelitian skripsi peneliti yang berjudul “*Peranan Perempuan Dalam Politik Nasional Jepang Tahun 1980-2000*”. Kesimpulan ini merupakan jawaban atas permasalahan yang diteliti oleh peneliti yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Penulis membagi menjadi beberapa hal pokok yang dipaparkan pada bagian berikut.

#### 5.1 Simpulan

*Pertama*, kedudukan perempuan dalam kehidupan masyarakat Jepang dipengaruhi oleh dua faktor yaitu konsep *Ie* dalam budaya masyarakat Jepang dan kedudukan perempuan setelah pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1947 di Jepang. Sistem *Ie* adalah sistem keluarga dalam masyarakat Jepang yang merupakan tempat berkumpul anggota keluarga beserta tempat mereka melaksanakan kehidupan sosial mereka bersama. Sistem *Ie* di era Meiji semakin kuat sejak diberlakukannya Undang-Undang Sipil Meiji. Sistem *Ie* tidak hanya mengikat kaum bangsawan dan samurai, tetapi juga ke seluruh masyarakat hingga ke wilayah pedesaan.

Kekalahan Jepang dari Sekutu dalam Perang Dunia II membuat Amerika Serikat menduduki Jepang dan menyusun sistem politik dan pemerintahan yang baru bagi Jepang. AS membawa banyak reformasi dan perubahan bagi Jepang, mereka bahkan membuatkan Konstitusi Jepang pada 1947. Dalam konstitusi tersebut, sistem pemerintahan Jepang diubah dari kekaisaran menjadi parlementer, posisi Kaisar hanya sebagai simbol bangsa Jepang saja tanpa memiliki kekuasaan mengatur dan menjalankan pemerintahan, dan masyarakat dijamin hak nya untuk beraktivitas dan berpartisipasi dalam pemerintahan. AS juga membuat kesetaraan perempuan dalam sistem masyarakat Jepang.

*Kedua*, faktor-faktor keterlibatan perempuan dalam politik jepang ada pasca kependudukan Amerika Serikat, keinginan Jepang untuk menjadi negara yang

Budi Mulyana, 2015

**PERANAN PEREMPUAN DALAM POLITIK NASIONAL JEPANG TAHUN 1980-2000**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mampu menjadi sejajar dan diperhitungkan di mata internasional semakin besar. Jepang menempuh banyak proses hingga menyetujui diberlakukannya Konstitusi 1947 sebagai Konstitusi negara. Usaha Jepang untuk menerapkan aturan sesuai dengan kondisi domestik negaranya memakan waktu yang cukup lama. Isu tentang Hak Asasi Manusia, yang memiliki keterkaitan erat dengan nasib kaum perempuan di Jepang mengalami pasang surut.

Kehadiran Takako Doi di ranah politik dan pemerintahan Jepang menuai ragam kontroversi, akan tetapi langkah tersebut dianggap revolusioner dan mampu menjadi tren baru bagi kaum perempuan di Jepang. Fenomena hadirnya sosok perempuan di tubuh Diet Jepang, yang ditandai oleh peran sempurna Takako Doi. Era perempuan dianggap sebagai prestasi yang luar biasa bagi Jepang, terutama setelah mendapatkan kritik dari dunia internasional, terkait minimnya peluang perempuan untuk mendapatkan status sosial yang baik di masyarakat.

*Ketiga*, peranan yang dilakukan perempuan dalam politik Jepang seperti pada negara dengan bentuk masyarakat patriarki lainnya merupakan cerminan dari dominasi laki-laki. Aturan –aturan yang berlaku menjadi batasan untuk mensformasi kekuatan perempuan dalam keluarga, masyarakat maupun sistem politik. Walaupun dalam Konstitusi pasca perang perempuan mendapatkan hak berpolitik yang sama dengan laki-laki, tetapi kenyataannya partisipasi perempuan dalam perpolitikan tidak lebih dari sekedar pemilih.

Proses demokrasi politik di Jepang dapat dikatakan berjalan lamban, terutama menyangkut hak-hak perempuan dalam berpolitik, yang baru dapat berfungsi secara efektif pasca Perang Dunia II, serta menggunakan sistem Barat sebagai tolak ukur. Hal ini juga melatari sikap tidak peduli perempuan Jepang terhadap politik, yang dianggap sebagai pekerjaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai hidup mereka dan tidak berhubungan langsung dengan kehidupan kaum perempuan.

Dengan tingkat kesadaran yang terus meningkat partisipasi politik perempuan yang cukup tinggi tersebut diharapkan diikuti pula oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya

diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat suatu kebijakan.

*Keempat*, dampak keterlibatan perempuan dalam politik terhadap kebijakan – kebijakan pemerintah Jepang, yang menjadi masalah utama bukanlah perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi bahwa laki-laki memandang rendah perempuan dan perempuan sendiri yang cenderung “memaafkan” cara pandang tersebut dengan bersikap seolah memang peran perempuan tidak cocok dengan bidang politik.

Keterlibatan perempuan Jepang di tubuh pemerintahan berkembang secara bertahap dan memiliki pengaruh cukup baik dalam politik negara. Terutama menyangkut perihal hak asasi perempuan di mata Internasional. Melonjaknya jumlah perempuan untuk terjun dalam pemerintahan dikenal sebagai “*madonna Boom*”. Madonna Boom adalah hasil kerja keras Takako Doi dalam memperjuangkan suara kaum perempuan untuk bergabung di pemerintahan Jepang.

## 5.2 Rekomendasi

Skripsi yang berjudul ” *Peranan Perempuan Dalam Politik Nasional Jepang Tahun 1980-2000*” ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi beberapa pihak antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)

Bagi lembaga pendidikan, kajian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan tambahan materi pada mata pelajaran Sejarah khususnya pada tingkat Sekolah Menengah Atas. Semoga dengan adanya penelitian ini siswa di lingkungan Sekolah Menengah Atas (SMA) mampu memperluas wawasannya dan menambah pengetahuannya untuk mendalami sejarah bangsa lain.

2. Bagi pembaca dan penulis

penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca, baik untuk para akademisi maupun pembaca pada umumnya mengenai permasalahan yang terjadi setelah Perang Dunia II. Skripsi ini pun diharapkan menjadi dasar atau patokan untuk penelitian lainnya mengenai sejarah Jepang, khususnya dalam

peranan perempuan dalam politik Jepang. Dalam kajian penelitian skripsi ini, ada beberapa kajian yang dapat diperdalam atau diangkat, seperti faktor pendukung keikutsertaan perempuan dalam politik Jepang.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyadari pembahasan mengenai peranan perempuan dalam politik nasional Jepang tahun 1980-2000 di berbagai bidang lainnya tidak di bahas lebih mendalam. Maka dari itu skripsi ini dapat dijadikan sebagai rujukan atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Beberapa kajian yang dapat diangkat mengenai peranan perempuan dalam partai politik Jepang sesudah ditetapkannya Undang-Undang 1947, kemudian peranan Takako Doi dalam politik Jepang.

4. Bagi Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia

Bagi Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), skripsi ini diharapkan dapat memperkaya tulisan mengenai sejarah Asia Timur khususnya Jepang dan Peranan Perempuan Dalam Politik Nasional Jepang. karena sejauh ini, skripsi yang meneliti tentang sejarah Peranan Perempuan Dalam Politik Nasional Jepang masih jarang ditemukan di Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).